

# Charles Meikyansyah Minta Kelompok Masyarakat Miskin Baru Segera Didata Agar Dapat Bansos BBM

Updates. - [INDONESIASATU.ID](https://indonesiasatu.id)

Sep 7, 2022 - 14:45



*Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah*

JAKARTA - Anggota Komisi XI [DPR RI](https://dpr.go.id) Charles Meikyansyah meminta Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi [BBM](https://www.bbm.go.id) melalui bantalan sosial. Karena itu, pemerintah diingatkan agar segera mendata

masyarakat, khususnya mereka yang masuk dalam kategori orang miskin baru buntut kenaikan [BBM](#).

“Bantalan sosial melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat harus segera didistribusikan, karena kenaikan [BBM](#) juga akan berdampak terhadap kenaikan berbagai komoditas kebutuhan lainnya,” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Media, Rabu (7/9/2022).

Politisi dari Fraksi [NasDem](#) ini juga mendesak Pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak langsung terhadap kenaikan [BBM](#). Seperti pekerja jasa transportasi umum dan ojek, pelaku [UMKM](#), nelayan atau pekerja di sektor perikanan, hingga pekerja di sektor pertanian dan pangan yang mengandalkan angkutan logistik.

“Kami juga memberi catatan kepada Pemerintah untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang sebelum kenaikan [BBM](#) ada di atas garis kemiskinan dan tidak masuk radar [BLT](#) (bantuan langsung tunai). Sekarang akibat pandemi Covid-19 dan harga [BBM](#) naik, mereka masuk dalam kategori rentan miskin,” ucap Charles.

Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelas menengah paling bawah. Menurut dia, mereka yang kini masuk di garis kemiskinan tersebut di antaranya seperti buruh, pekerja informal perkotaan, petani/nelayan, bahkan sopir ojek online (ojol) dan driver taksi. “Jumlah mereka cukup besar. Bukan kelompok desil 1 dan 2, tapi desil 3-5,” terangnya.

Desil merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasarkan penghasilan masyarakat. Desil 1 dan 2 merupakan kelompok masyarakat miskin absolut yang biasanya berada di pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sementara itu desil 3 adalah kelompok rumah tangga hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 ke atas adalah kelompok masyarakat mampu hingga sangat mampu. “Ojek online awalnya masuknya 4-6. Sekarang berat dan bisa jadi masuk desil 3-4. Sopir taksi juga berat karena saat pandemi tidak dapat pemasukan. Kenaikan [BBM](#) juga menambah beban,” sebut Charles.

Oleh karenanya, Charles meminta Pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan miskin tersebut. Pendataan dan pemberian bansos [BBM](#) harus sesuai dan tepat sasaran.

Komisi XI [DPR RI](#) yang membidangi urusan keuangan pun meminta agar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Bantuan Sosial, serta Belanja Tidak Tetap dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh daerah.

“Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk digunakan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga [BBM](#),” imbaunya.

Seperti diketahui, inflasi diperkirakan akan naik seiring dengan kenaikan harga [BBM](#) bersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga [BBM](#) memicu kenaikan harga bahan pangan, biaya transportasi umum, biaya produksi di sektor perikanan dan pertanian, serta biaya logistik.

Bahkan, di sejumlah daerah tarif angkutan umum dan ojek konvensional sudah mengalami kenaikan. Nelayan pun mengalami kesulitan melaut karena biaya produksi meningkat, dan jasa ekspedisi lokal juga naik hingga 30 persen karena kenaikan harga [BBM](#).

Disisi lain, ia meminta agar kebijakan penyesuaian tarif untuk angkutan umum, taksi, kendaraan online diperhatikan dengan seksama oleh Pemerintah. Charles mengingatkan, pengawasan yang ketat harus dilakukan agar penyesuaian tarif jasa transportasi tidak berlebihan. (ann/aha)